

Konstitusionalitas Hak Masyarakat Hukum Adat atas Hak Ulayat *Rumpon* di Provinsi Lampung

Constitutionality Rights of Indigenous People on the Ulayat Rumpon Rights In Lampung Province

Ahmad Redi, Yuwono Prianto, Tundjung Herning Sitabuana dan Ade Adhari

Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara

Jl. S Parman No.1 Grogol, Jakarta Barat

Email: ahmadr@fh.untar.ac.id, yuwonoprianto@gmail.com,
tundjunghidayat@yahoo.com, adea@fh.untar.ac.id,

Naskah diterima: 28/07/2017 revisi: 15/08/2017 disetujui 04/09/17

Abstrak

Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 mengatur mengenai penghormatan dan pengakuan atas satuan-satuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang keberadaannya masih ada. Salah satu hak masyarakat adat di masyarakat pesisir di Provinsi Lampung ialah hak *rumpon* sebagai hak ulayat laut. *Rumpon laut* secara bahasa merupakan jenis alat bantu penangkapan ikan yang dipasang di laut, baik laut dangkal maupun laut dalam. Saat ini eksistensi *rumpon laut* terancam keberadaannya karena untuk menjaga dan melestarikan sistem pengelolaan perikanan ini tidak didukung oleh tindakan nyata oleh Pemerintah dan masyarakat sekitar pesisir. Tulisan ini melakukan pengkajian atas hak masyarakat hukum adat atas hak ulayat *rumpon* di Provinsi Lampung dengan fokus penelitian pada eksistensi hak ulayat laut *rumpon* pada masyarakat Lampung dan perlindungan konstitusional atas hak ulayat *rumpon* laut. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode *socio-legal* yang melakukan kajian terhadap aspek hukum dalam ranah *das sollen* dan *das sein*.

Kata kunci : Konstitusionalitas, Masyarakat Hukum Adat, Hak Ulayat, *Rumpon*.